



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 56 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Dinas Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Dinas Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2023.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 56**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DINAS, BERENCANA, PEREMPUAN
PERLINDUNGAN DAN ANAK
KERJA
PENGENDALIAN
KELUARGA
PEMBERDAYAAN
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima

tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut disusun berdasarkan Kabupaten Garut, Renstra DPPKBPPPA Kabupaten Garut, serta berpedoman pada Renja dan Lembaga terkait urusan yang diemban oleh DPPKBPPPA Kabupaten Garut.

Proses penyusunan Renja DPPKBPPPA Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada Renstra 2019-2024 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2023. Tahun 2023 merupakan tahun ke-3 perencanaan pembangunan Kabupaten Garut yang berpedoman pada RPJMD 2019-2024. Sesuai dengan tugas dan fungsi DPPKBPPPA Kabupaten Garut serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019 -2024.

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan masa depan secara tepat dari sejumlah pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode satu tahun ke depan, dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas PPKBPPPA dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan melalui proses penyusunan dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang, dengan memperhatikan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Dinas PPKBPPPA merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Garut yang dilaksanakan melalui proses politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, serta melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), baik tingkat desa/kelurahan, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten. Oleh karenanya, Rencana Kerja Dinas PPKBPPPA merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan di atasnya yaitu, Dokumen RPJMD tahun 2019-2024, Renstra Dinas PPKBPPA tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Selain itu, Rencana Kerja ini bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dokumen Rencana Kerja Dinas PPKBPPPA tahun 2023, merupakan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Dinas PPKBPPPA dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023 maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Garut tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 150/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelembagaan Keluarga Kecil dan Jejaring Program Keluarga Berencana;
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
36. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

37. Peraturan Bupati Garut Nomor 58 tahun 2016 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut; dan
38. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas PPKBPPPA tahun 2023 ditetapkan dengan maksud supaya dijadikan pedoman penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Aparatur Dinas PPKBPPPA, masyarakat, serta *stakeholder* lain dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Garut sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas PPKBPPPA tahun 2023 adalah :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis, sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan prioritas pembangunan;

2. Menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023, yang disertai dengan program prioritas untuk sekretariat dan masing-masing bidang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
3. Menetapkan indikator kinerja sekretariat dan masing-masing bidang sebagai dasar penilaian keberhasilan sasaran kerja tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Strategis

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT KERJA

Memuat tentang Perencanaan dan Pendanaan Perangkat Kerja.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil Instansi Pemerintah Kabupaten Garut dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada Renja OPD tahun lalu (tahun 2021).

Rencana Kerja (Renja) Dinas PPKBPPPA Kabupaten Garut Tahun 2023 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PPKBPPPA Kabupaten Garut Tahun 2023. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas PPKBPPPA Kabupaten Garut Tahun 2023, dilaksanakan seperti yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diperbarui dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut Tahun 2023.

Berdasarkan pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut Tahun 2021, dilaksanakan sebanyak 10 program, 25 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas PPKBPPA Kabupaten Garut

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas yang Responsif Gender			75%	75%	100%	75%		
Pelebagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelebagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	100%		
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga yang memiliki Focal Point PPRG			33 Focal Point	33 Focal Point	100%	33 Focal Point		
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	100%		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan/Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Kelompok PEKKA yang terbina			10 Kelompok PEKKA	10 Kelompok PEKKA	100%	10 Kelompok PEKKA		
Penguatan dan Pengembangan	Persentase Cakupan			100%	100%	100%	100%		

Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota								
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi dan lembaga layanan perempuan responsif gender			67 Organisasi Perempuan	67 Organisasi Perempuan	100%	67 Organisasi Perempuan		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas yang Responsif Gender			75%	75%	100%	75%		
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	100%		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pasangan yang mendapat buku nikah			50 Pasangan	50 Pasangan	100%	50 Pasangan		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas yang Responsif Gender			75%	75%	100%	75%		
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	100%		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Keluarga sehat Sejahtera di desa Binaan P2WKSS			100 KK	100 KK	100%	100 KK		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam			100%	100%	100%	100%		

	Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pembelajaran Keluarga			14 Layanan	14 Layanan	100%	14 Layanan		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas ramah Anak			70%	70%	100%	70%		
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	100%		
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas ramah Anak			70%	70%	100%	70%		
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah partisipasi Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha dalam kegiatan Kabupaten Layak Anak			100%	100%	100%	100%		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Rapat dan Sosialisasi			395 Orang	395 Orang	100%	395 Orang		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/ Pembentukan/ Pembinaan/ BIMTEK dalam Mendukung Kegiatan Kabupaten Layak Anak			100%	100%	100%	100%		
Penyediaan Layanan Peningkatan	Jumlah Kampung Ramah			5 KRA	5 KRA	100%	5 KRA		

Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak								
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Rakor dan Puncak Hari anak			1 Peringatan	1 Peringatan	100%	1 Peringatan		
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang ikut serta dalam Forum anak			1375 Orang	1375 Orang	100%	1375 Orang		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas ramah Anak			70%	70%	100%	70%		
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan dan Penanganan Kasus Kekerasan Anak/Sosialisasi dalam Program Perlindungan Khusus Anak			100%	100%	100%	100%		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap anak			45 Kasus	45 Kasus	100%	45 Kasus		
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						100%			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun			10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan			6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja			4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kehadiran Pegawai			90%	90%	100%	90%		

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Realisasi Anggaran			6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Petugas Keamanan			4 Orang	4 Orang	100%	5 Orang		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK			57 Jenis	57 Jenis	100%	48 Jenis		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan			9 Jenis	9 Jenis	100%	10 Jenis		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang lengkap			10 Eksemplar	10 Eksemplar	100%	10 Eksemplar		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Peserta Rapat dan Tamu			1808 Orang	1808 Orang	100%	2500 Orang		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Surat Perjalanan Dinas			72 Kegiatan	72 Kegiatan	100%	36 Kegiatan		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana perkantoran			126 Jenis	126 Jenis	100%	17 Jenis		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukti Pembayaran			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan			4 Orang	4 Orang	100%	4 Orang		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional			309 Unit	309 Unit	100%	328 Unit		

Kendaraan Dinas Jabatan									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/ Operasional			15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung			4 Unit	4 Unit	100%	3 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah komputer dan printer			50 Unit	50 Unit	100%	21 Unit		
						100%			
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Akurasi Data dan Informasi dibanding jumlah Kecamatan			65%	65%	100%	69%		
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Cakupan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk			100%	100%	100%	100%		
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Petugas Lapangan			504 Orang	504 Orang	100%			
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengetahuan Pemahaman Petugas dan Komitmen Lintas Sektoral Tentang Masalah Kependudukan			100%	100%	100%	100%		
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah SDM Pengelola Pengolahan Data Kependudukan			296 Orang	296 Orang	100%	210 Orang		
Pemetaan Kependudukan	Jumlah SDM Pengelola Pemetaan Kependudukan			42 Orang	42 Orang	100%	42 Orang		
Membentuk Rumah Data Kependudukan diKampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah SDM Pengelola Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (RDK- IK)			588 Orang	588 Orang	100%	2593 Orang		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah SDM Pengelola Bangsa Kencana			120 Orang	120 Orang	100%	1 Dokumen		
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Balai Penyuluhan KB			8 Balai Penyuluh	8 Balai Penyuluh	100%	42 Balai Penyuluh		
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah SDM Petugas Lini Lapangan yang menguasai teknis pendataan Keluarga			296 Orang	296 Orang	100%	120 Orang		

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kesertaan ber KB (CU/PUS)			71.50%	71.50%	100%	71.50%		
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			100%	100%	100%	100%		
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Media			4 Media	4 Media	100%	12 Kegiatan		
Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Pengelola Program KKBPK			475 Orang	475 Orang	100%	12 Kegiatan		
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Rakor Tingkat Desa			4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan		
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Pengelola BOKB			289 Orang	289 Orang	100%	504 Orang		
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			100%	100%	100%	100%		
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Pos KB Desa dan Sub Pos KB Desa			442 Pos KB dan 4389 Sub Pos KB	442 Pos KB dan 4389 Sub Pos KB	100%	442 Pos KB dan 4389 Sub Pos KB		
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Balai Penyuluhan KB			21 Balai Penyuluh	21 Balai Penyuluh	100%	9 Balai Penyuluh		
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Kecamatan			42 Kecamatan	42 Kecamatan	100%	4 Kegiatan		
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah SDM tenaga pendata yang menguasai teknis Rekapitulasi pendataan keluarga			4831 Orang	4831 Orang	100%	2 Kegiatan		
Pengendalian dan Pendistribusian	Persentase Pengendalian			100%	100%	100%	100%		

Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB								
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Akseptor IUD dan Implant yang telah dilayani			7583 Akseptor	7583 Akseptor	100%	11844 Akseptor		
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor MOW			230 Akseptor	230 Akseptor	100%	180 Akseptor		
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah FASKES			159 Faskes	159 Faskes	100%	159 Faskes		
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Balai Penyuluhan KB			8 Balai Penyuluh	8 Balai Penyuluh	100%	4 Balai Penyuluh		
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pencatatan dan pelaporan hasil layanan kontrasepsi			144 Faskes	144 Faskes	100%	144 Faskes		
Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor Baru Medis Operasi Pria (MOP)			100 Akseptor	100 Akseptor	100%	70 Akseptor		
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			100%	100%	100%	100%		
Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Cakupan Bina Ketahanan Keluarga			82%	82%	100%	85%		
Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase Cakupan Bina Ketahanan Keluarga			82%	82%	100%	85%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga			25%	25%	100%	25%		

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga			100%	100%	100%	100%		
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Kader Pokja Pik-R dan BKR yang Terbina			15 Kelompok	15 Kelompok	100%	20 Kelompok		
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Alat Peraga Kit Siap Nikah Anti Stunting			25 Alat Peraga	25 Alat Peraga	100%	17 Alat Peraga		
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Alat Permainan Edukatif (Alat Peraga)			14 Alat Peraga	14 Alat Peraga	100%	5290 Orang		
Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Cakupan Bina Ketahanan Keluarga			82%	82%	100%			
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Prosentase Peningkatan Penjualan Hasil Produksi Kelompok UPPKS			50%	50%	100%			
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Peserta Sosialisasi Pemahaman Kespro bagi Catin			900 Orang	900 Orang	100%	1888 Orang		
Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Ibu hamil dan Ibu			25 Kelompok	25 Kelompok	100%	30 Kelompok		

	Baduta								
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Cakupan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			100%	100%	100%	100%		
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Persentase Cakupan Bina Ketahanan Keluarga			82%	82%	100%	85%		
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Kelompok Genre dan Duta Remaja			25 Kelompok	25 Kelompok	100%	30 Kelompok		

Sumber : LAKIP 2021

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 disajikan persasaran sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas PPKBPPA Kabupaten Garut
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan KB dan PPPA	100%	100%	100%
2	Menurunnya Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	2.40	2.40	100%
3	Persentase jumlah keluarga pra sejahtera berbanding jumlah keluarga	5.6%	5.6%	100%
4	Meningkatnya kualitas hidup serta fungsi dan peran perempuan dalam pembangunan (Nilai APE)	700 Point (Utama)	700 Point (Utama)	100%
5	Meningkatnya Nilai Indikator KLA (Nilai KLA)	Madya	Madya	100%
6	Nilai Evaluasi SAKIP	78,01	78,03	100%
	Rata-rata			100%

Sumber: LAKIP 2021

Sasaran 1

Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan KB dan PPPA

Capaian sasaran tersedianya data dan informasi kependudukan KB dan PPPA dapat dilihat dari capaian indikator persentase data peserta KB serta informasi dan data mikro keluarga di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang tercapai 100%. Indikator ini tercapai karena dilaksanakannya sistem informasi kependudukan dan keluarga melalui pencatatan dan pelaporan capaian peserta KB setiap kecamatan setiap bulannya atau ditargetkan sebanyak 446 desa 4600 RW (12 umpan balik) sebagai laporan bulanan perkembangan Program KKB di setiap kecamatan. Selain itu, semua desa/kelurahan memiliki data mikro keluarga melalui mekanisme mutasi data keluarga. Disamping itu, indikator ini didukung juga oleh pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sebanyak 810.227 KK dan berhasil dicapai 810.227 KK pula. Harapan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas data dan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan.

Sasaran ini didukung pula Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.

Kegiatan ini diwujudkan dalam 1 sub kegiatan, yaitu Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK. Merupakan forum pertemuan intern mingguan antara Pengawas/Koordinator Tk. Kecamatan dengan PKB/PLKB/TPD dan TKK yang ada dalam wilayah binaannya dalam rangka mengevaluasi dan menyusun rencana kegiatan, baik rencana mingguan ataupun bulanan. Sasaran dari kegiatan ini adalah teknis pengelolaan program KKB di tingkat lini lapangan. Keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya staff meeting di 42 kecamatan. Outcome (Hasil). Kegiatan berikutnya adalah Pemetaan

Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang didukung beberapa sub kegiatan: 1) Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya dokumen pengendalian lapangan berupa F1 dan F2 bagi 296 orang petugas lapangan di 42 Kecamatan. Hasil yang diharapkan adalah 1) meningkatnya kualitas dan akurasi pencatatan dan pelaporan data. 2) Pemetaan Kependudukan. Keluaran sub kegiatan ini adalah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Data Kependudukan di Tk. Kecamatan yang dilakukan oleh 1000 Pos KB Desa dalam pemutakhiran data keluarga sejahtera. 3) Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya bank data kependudukan terintegrasi yang melibatkan 588 orang selama 8 kali kegiatan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya koordinasi dan kerjasama mitra kerja dalam mendukung program bangga kencana. 4) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga. Keluaran sub kegiatan ini adalah terbinanya pengelola pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di lini lapangan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas dan akurasi data pengendalian lapangan. 5) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga. Keluaran sub kegiatan ini adalah Tersedianya sarana dan Prasarana SIGA di 8 Balai Penyuluhan KB. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kelancaran program Bangga Kencana di lini lapangan. Kegiatan ini untuk mempercepat penyelesaian Pemutakhiran Data Keluarga sebanyak 219.843 KK 42 Kecamatan, 446 desa, 4681 RW. Dengan pengeluaran anggaran ini diharapkan hasil pemutakhiran Data Keluarga tersedianya cakupan data dan informasi yang akurat. 6) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya orientasi pendataan keluarga bagi 296 orang. Hasil yang diharapkan adalah

Tersedianya data dan informasi Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB. Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh petugas lini lapangan KB. Keluaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya akurasi pencatatan dan pelaporan pada dokumen F1 dan F2 pengendalian lapangan (dallap). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya cakupan data dan informasi program KKBPK. khusus para petugas lapangan” Keluaran utama dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terselenggaranya kegiatan pertemuan teknis pengelolaan program KKB di tingkat lini lapangan selama 12 bulan (3936) dan terealisasi sebanyak 12 bulan (3936) juga yang akan membawa dampak pada peningkatan akurasi dan kualitas data dan pencapaian target peserta KB baru dan terbinanya peserta KB aktif. Harapan dari kegiatan ini adalah meningkatnya teknis pengelolaan program KKB di tingkat lini lapangan. Disamping itu, indikator ini diperkuat pula dengan penyebaran penyuluhan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang terintegrasi melalui berbagai kegiatan di dunia akademik seperti menjadi bagian dalam pembekalan kuliah kerja nyata. Jadi, selain berfokus pada ketersediaan data yang akurat dan akuntabel, dengan adanya pengenalan informasi komprehensif mengenai kependudukan diharapkan masyarakat memahami akan pentingnya kependudukan, terutama bagi para remaja yang merupakan populasi terbanyak dalam struktur kependudukan Indonesia saat ini. Secara keseluruhan indikator ini tercapai 100%

Berdasarkan data tersebut diatas capaian sasaran Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan KB dan PPPA rata-rata tercapai 100%.

Sasaran 2

Menurunnya Angka Kelahiran.

Capaian indikator menurunnya angka total fertility rate didukung penuh oleh program Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). Indikator ini

memiliki tujuan langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2021 pencapaian peserta KB baru sampai Bulan Desember 2021 yang dilaporkan hasil pelayanan Klinik KB Pemerintah, Klinik KB Swasta, DPS, BPS dan Faskes lainnya sebanyak 95.667 akseptor Dari PPM (Proyeksi Permintaan Masyarakat) sebanyak 82.413.

Dilihat dari masa pemakaian Alat kontrasepsi, pencapaian akseptor baru pada Bulan Desember 2021 adalah terdiri atas PB (Peserta) Non Hormonal sebesar 230 akseptor atau 12,54% dan PB (Peserta) Hormonal sebesar 7583 akseptor atau 87,46 % dari total pencapaian sebesar 82.413 akseptor. Capaian ini diimplementasikan melalui kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB dan pelayanan KB Medis Operasi bagi Pria dan wanita dengan target 430 akseptor yang dilaksanakan secara terpusat di RS Guntur Garut, Faskes Bunda Alya dan Pelayanan KB MO wilayah selatan yang dipusatkan di Kecamatan Pakenjeng, Cisewu, dan Caringin yang berhasil mendapatkan 430 akseptor. Disamping itu indikator ini ditunjang oleh beberapa kerjasama lintas sektoral yaitu, Bakti Manunggal TNI-KB-KES tingkat Kabupaten dan Kesatuan Gerak PKK-KB-KES Terpadu tingkat Kabupaten yang merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam upaya intensifikasi peran gerakan PKK dalam Program Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan kesehatan yang disinergikan dengan program pemerintah untuk mewujudkan keluarga berkualitas terutama pada masyarakat pra sejahtera dan KS-1.

Sasaran ini ditunjang pula oleh kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan sub kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan informasi

program KKB bagi masyarakat dengan tersedianya 4 media guna mempromosikan dan memboomingkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah meningkatnya promosi program KKB melalui media cetak luar dan dalam ruang sehingga masyarakat pun semakin sadar akan pentingnya program KKB. Sub kegiatan lainnya adalah Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK. Keluaran sub kegiatan ini adalah adanya apresiasi bagi pengelola program KB sebanyak 475 orang. Hasil yang diharapkan adalah Meningkatnya Kualitas Pengelola Program KB Dalam Pencitraan Program KKBPK (Harganas). Sub kegiatan lain yang turut mendukung pencapaian sasaran ini adalah Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok). Keluaran utama dari pelaksanaan sub kegiatan tersebut adalah terselenggaranya kegiatan pertemuan teknis pengelolaan program KKB di tingkat lini lapangan selama 12 bulan (3936) dan terealisasi sebanyak 12 bulan (3936) juga yang akan membawa dampak pada peningkatan akurasi dan kualitas data dan pencapaian target peserta KB baru dan terbinanya peserta KB aktif. Harapan dari kegiatan ini adalah meningkatnya teknis pengelolaan program KKB di tingkat lini lapangan.

Sasaran ini didukung pula oleh sub kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya manajemen operasional pengelolaan keuangan BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) kepada 289 orang pengelola BOKB. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen operasional keuangan BOKB sehingga BOKB ini bisa menunjang

operasional pelayanan KKBPK di lini lapangan dan bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Kegiatan lainnya yang turut berkontribusi dalam pencapaian sasaran ini adalah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB). Sub kegiatan pertama dari kegiatan ini adalah Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terselenggaranya pembinaan Program KKBPK kepada Pos KB Desa dan Sub Pos KB Desa dengan target 442 Pos KB Desa dan 4389 Sub Pos KB Desa dan berhasil dilaksanakan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman dan peran serta institusi masyarakat dalam Program KKBPK. Sub kegiatan berikutnya adalah Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana pendukung operasional PKB/ PLKB di 21 Balai Penyuluhan KB dan tersedianya 1 gedung alat dan obat kontrasepsi yang representatif. Pada tahun anggaran 2021, sarana pendukung operasional KB untuk 21 Balai Penyuluh KB dan terbangunnya 1 gudang alokon berhasil diadakan. Keberadaan sarana pendukung operasional dan gedung alokon tersebut sangat vital dalam menjamin keberlangsungan aktivitas pelayanan KKBPK di masyarakat dan menjamin ketersediaan stok alat dan obat kontrasepsi dengan pengelolaan yang baik. Sub kegiatan lainnya adalah Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB). Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi, konsultasi dan diskusi program KB yang dilakukan secara rutin sebagai sarana untuk melihat perkembangan berjalannya program KKBPK di 42 Kecamatan. Target utama dari acara ini adalah seluruh PKB/ PLKB di lini lapangan yang ada di 42 Kecamatan. Hasil

yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat dalam program KKBPK. Sub kegiatan berikutnya adalah Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pemutakhiran data kependudukan dan keluarga berencana. Target dari kegiatan ini adalah 1 kali dan melibatkan 4831 orang dan berhasil dilaksanakan. Pelaksanaan pemutakhiran data ini terkendala oleh wabah COVID-19, tetapi dengan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja kendala tersebut bisa teratasi dan pemutakhiran data yang melibatkan Pos KB dan Sub Pos KB Desa ini bisa rampung diselesaikan.

Kegiatan yang turut membantu tercapainya sasaran menurunnya angka kelahiran adalah Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan pertama dari kegiatan ini adalah Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya. Keluaran sub kegiatan ini adalah terpenuhinya alat obat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi 159 fasilitas kesehatan yang tersebar di 42 kecamatan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terjaminnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi guna pelayanan pemasangan alat kontrasepsi bagi 7583 akseptor yang ada di 42 Kecamatan. Sub kegiatan berikutnya adalah Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan layanan konseling kepada calon akseptor dengan target 110 akseptor supaya mereka menjadi akseptor KB. Hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan, wawasan dan kesadaran sekaligus minat masyarakat akan pentingnya program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Sub kegiatan berikutnya adalah Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat

Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB yang diperuntukkan bagi 159 Faskes di 42 Kecamatan. Hasil yang diharapkan adalah terpenuhinya Alokon di fasilitas kesehatan (FASKES) sehingga memudahkan aksesibilitas pelaksanaan pelayanan KB.

Seluruh dari capaian sasaran ini telah berkontribusi dalam pencapaian target tingkat kesertaan peserta KB (CU/PUS), yaitu 71,50 dan tercapai 71,50 atau 100%. Jadi, secara rata-rata sasaran menurunkan laju pertumbuhan penduduk dengan indikator kinerja menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate) terealisasi 100%.

Sasaran 3

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Capaian indikator persentase jumlah keluarga pra sejahtera berbanding jumlah keluarga didukung oleh program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera keluarga. Capaian indikator ini ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% yang terwujud melalui kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang memiliki 7 sub kegiatan, yaitu Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang memiliki keluaran terlaksananya Kegiatan pembentukan (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) untuk 30 kelompok Bina

Keluarga, Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) yang memiliki sasaran Pengadaan Alat Peraga Bina Keluarga Balita (BKB Kit Stunting Bina Keluarga Balita (BKB) kit Stunting sebanyak 14 paket. Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKRR, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) yang memiliki sasaran untuk melaksanakan Pengadaan Alat Peraga Kit Siap Nikah Anti Stunting sebanyak 25 kelompok. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKRR, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) dengan sasaran Kegiatan Pembinaan Kelompok Kegiatan (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKRR, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) di Luar Kampung KB. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKRR, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) dengan sasaran Kegiatan Pembinaan kelompok UPPKS/A dalam rangka peningkatan penjualan hasil produksi kelompok UPPKS sebanyak 15 kelompok. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) dengan sasaran Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Stunting Bagi Calon Pengantin sebanyak 15 Kelompok. Advokasi dan Promosi IPK dengan keluaran terlaksananya edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi Ibu Hamil dan Keluarga untuk Mengatasi Stunting yang menysasar 2100 Keluarga yang Mempunyai Baduta dan Ibu Hamil di 42 Kecamatan dan 420 Keluarga dan Ibu Hamil.

Indikator ini didukung pula oleh kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Sub kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKRR, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS). Keluaran sub kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan kesatuan gerak PKK bangga Kencana Kesehatan dalam meningkatkan kesetaraan ber-KB sebanyak 25 kegiatan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya koordinasi dan kerjasama pelayanan KB lintas sektoral. Sub kegiatan berikutnya adalah Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja. Keluaran sub kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan Sosialisasi program Generasi berencana kepada 36 kelompok kegiatan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terutama remaja akan pentingnya program Generasi Berencana. Pada tahun 2021, Kabupaten Garut meraih gelar ketiga Duta GenRe tingkat Propinsi Jawa Barat.

Sampai tahun 2021 terdapat sebanyak 502.057 keluarga pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera (KS) 1 dari jumlah total keluarga, yaitu 810.227. Hasil ini tentunya akan terus menjadi pekerjaan kedepannya supaya keluarga yang sebelumnya berada pada tahapan pra sejahtera dan sejahtera 1 bisa naik untuk berada pada tahapan keluarga sejahtera 2 dan 3. Target dari 5.6% di sini merupakan target peralihan status keluarga dari tahapan pra sejahtera menuju sejahtera 1. Berdasarkan laporan umpan balik hasil kegiatan program KB bulan Desember 2021, terdapat sekitar 47000 keluarga yang beralih dari status keluarga pra sejahtera. Dengan demikian target 5.6% dari jumlah seluruh keluarga, yaitu sekitar 48000 keluarga, terdapat sekitar 48000

keluarga yang beralih status Berdasarkan hasil ini, sasaran terwujudnya keluarga sejahtera dengan indikator sasaran persentase jumlah keluarga pra sejahtera berbanding jumlah keluarga berhasil tercapai 100%.

Sasaran 4

Meningkatnya kualitas hidup serta fungsi dan peran perempuan dalam pembangunan

Capaian indikator ini ditargetkan 100% tercapai 100%, hal ini dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang diimplementasikan dengan kegiatan Pelembagaan Pengarus Utama Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersosialisasikannya informasi mengenai sistem kelembagaan yang mengarusutamakan gender yang tertuang mulai penganggaran yang responsif gender. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya lembaga-lembaga khususnya SKPD yang responsif gender. Berikutnya adalah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi/ Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Keluaran dari kegiatan ini adalah terbinanya 10 kelompok yang tergabung dalam kelompok perempuan kepala keluarga (PEKKA). Hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan keluarga khususnya para anggota PEKKA. Indikator ini didukung pula oleh sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota. Keluaran dari kegiatan ini adalah terbinanya organisasi wanita yang tergabung ke dalam

GOW (Gabungan Organisasi Wanita) dan DWP (Dharma Wanita Persatuan) Kabupaten Garut dengan rincian 1 Lembaga layanan perlindungan Perempuan, 67 Organisasi Perempuan/200 orang Anggota GOW. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemberdayaan anggota organisasi perempuan di Kabupaten Garut.

Indikator ini pula didukung oleh Program Perlindungan Perempuan Program ini diwujudkan dalam kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota. Keluaran kegiatan ini adalah Fasilitasi Sidang Isbat Nikah bagi 50 Pasangan Keluarga Pra sejahtera berikut Pencatatan Pernikahan/Buku Nikah, adanya 30 Layanan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan, adanya Pelatihan Untuk Perempuan Korban Kekerasan dan Fasilitasi Rumah Aman Dan Sekretariat UPT PPA Kabupaten Garut. Hasil yang diharapkan adalah Meningkatnya Perlindungan dan pemenuhan hak pencatatan pernikahan bagi Keluarga Pra sejahtera dan Meningkatnya Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah yang pro terhadap hak-hak perlindungan perempuan. Program ini berfokus pada Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan. Aksi nyata dari program ini adalah terselenggaranya dukungan operasional Penanganan kekerasan yang dilaksanakan oleh P2TP2A meningkatnya pemenuhan hak-hak Perempuan. Outcome kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas P2TP2A dalam menangani kasus. Hasil kegiatan ini adalah menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan.

Indikator ini turut didukung juga oleh Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Program ini diwujudkan dalam kegiatan Peningkatan Kualitas

Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini terimplementasi ke dalam 1 sub kegiatan, yaitu Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan sehingga terwujud keluarga berkualitas dengan sasaran 100 KK binaan dan 40 Perempuan Kepala Keluarga atau PEKKA. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya peran serta perempuan menuju keluarga sehat sejahtera di lokasi binaan P2WKSS. Outcome (Hasil) kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi lintas sektor dan lintas pelaku dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Kegiatan penting dalam program ini adalah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya layanan pembelajaran pada pusat pembelajaran keluarga atau Puspaga sebanyak 3 kali. Hasil yang diharapkan adalah Meningkatnya Jangkauan Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga.

Sasaran 5

Meningkatnya Nilai Indikator KLA

Untuk mencapai sasaran ke 6 ini, dijabarkan dalam indikator kinerja nilai tahapan kabupaten layak anak. Keluaran dari indikator ini adalah bertambahnya jumlah kecamatan yang meraih predikat sebagai kecamatan layak anak melalui berbagai program dan kegiatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung berdampak dalam presentase kecamatan layak ini.

Sasaran ke 6 berdasarkan rencana kerja tahun 2021 telah didukung tiga program, yakni Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak. Pertama, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, yang terwujudkan melalui Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyediaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku Data Gender dan Buku Profil Anak tahun 2021. Hasil yang diharapkan dari keberadaan Buku gender dan anak ini adalah mampu memberikan informasi yang jelas tentang gender dan anak di Kabupaten Garut guna menjadi bahan pengambilan kebijakan.

Program kedua adalah Program Pemenuhan Hak Anak yang termanifestasi melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha/ Kewenangan Kabupaten/ Kota. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi dan rapat dengan pemangku kebijakan tingkat kecamatan. Hasil yang diharapkan adalah adanya kesaamaan persepsi dan tujuan untuk memenuhi indikator-indikator tahapan kota/ kabupaten layak anak. Kegiatan berikutnya adalah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota, Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terbentuknya 5 Kampung Ramah Anak. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak, yang pada akhirnya mendukung indikator

Kabupaten Layak Anak. Berikutnya adalah Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Keluaran sub kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi peringatan Hari Anak Nasional. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak. Selanjutnya adalah Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terbentuknya Forum Anak Daerah di 5 Kecamatan. Hasil yang diharapkan adalah terakomodirnya partisipasi dan aspirasi anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa dan Kecamatan.

Ketiga Sasaran ini didukung oleh Program Perlindungan Khusus Anak. Program ini diwujudkan dalam kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota. Keluaran kegiatan ini adalah terpenuhinya penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap. Kegiatan tersebut bersifat memiliki harapan yaitu, terpenuhinya semua apa yang menjadi hak anak dan menurunnya angka kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi yang bersifat pencegahan. Di samping itu pada tahun 2021 ditengah keterbatasan aktivitas di ruang public karena wabah virus korona, keberadaan Forum Anak Daerah dan GenRe Garut turut aktif dalam menggelorakan berbagai kampanye yang intinya ingin meningkatkan kualitas anak dan remaja supaya mampu mewujudkan kabupaten Garut sebagai kabupaten yang ramah dan layak bagi keberadaan anak dan remaja yang ditandai dengan zero to violence (ketiadaan

kekerasan), zero early/ child marriage (tidak pada nikah anak/ dini), dan zero drugs (terbebas dari penyalahgunaan narkotika).

Sasaran 6

Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran tersebut diukur dengan 4 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu meningkatnya pelayanan aparatur, meningkatnya kinerja aparatur, meningkatnya nilai Evaluasi SAKIP dan Laporan Hasil Internal dan Eksternal.

Capaian Sasaran ini ditunjang dengan program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota. Program ini berhasil dilaksanakan secara penuh dalam 1 tahun. Keberhasilan program ini didukung oleh keberhasilan pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan penunjang. Pertama kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, evaluasi kinerja perangkat daerah. Kedua, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran. Ketiga, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD. Keempat, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kelima, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Keenam, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Ketujuh, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Capaian indikator Nilai IKM tercapai 100% karena kategori Nilai Baik bisa diraih dan dipertahankan. Kegiatan yang dominan berperan dalam meraih indikator Nilai IKM ini adalah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya seluruh dokumen pada aspek perencanaan secara sistematis yang disusun berdasarkan kebutuhan atau permintaan masyarakat dan isu-isu strategis yang mengitari jalannya program. Hasil dari dokumen perencanaan yang baik ini berimplikasi pada berkualitasnya kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat sehingga masyarakat merespon setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas. Respons baik ini kemudian bisa dilihat melalui laporan survey kepuasan masyarakat.

Capaian indikator rata-rata nilai SKP tercapai 100%. Indikator ini didukung oleh Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Keluaran sub kegiatan ini adalah persentase kehadiran pegawai, diharapkan dengan adanya penyediaan gaji dan tunjangan ini kehadiran pegawai semakin meningkat dan disiplin.

Target persentase kehadiran pegawai sebanyak 90% dari semua personel pegawai pada tahun 2021 bisa terealisasi 100%. Kegiatan lain yang berpengaruh terhadap indikator ini adalah Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya seperangkat alat tulis kantor sebanyak 57 jenis. Pada tahun 2021 57 jenis ATK ini bisa terealisasi 100% penuh. Sub kegiatan berikutnya yang menunjang adalah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan target 9 jenis dan terealisasi 9 jenis pula atau 100%. Sub kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang cetak dan penggandaan demi menunjang kelancaran kinerja. Selanjutnya adalah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan target 118 eksemplar bahan bacaan dan dokumen perundang-undangan dan berhasil terealisasi sebanyak 118 eksemplar atau 100%. Berikutnya, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya biaya dan surat perjalanan dinas dengan target 72 kegiatan. Sub kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kelancaran kerja pegawai. Kegiatan lainnya yang mendukung indikator Nilai IKM ini adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Keluaran sub kegiatan ini adalah terpenuhinya mobilitas operasional pada 15 unit kendaraan operasional berhasil dilaksanakan 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja pegawai khususnya bagi yang akan melaksanakan pelayanan di lini lapangan. Berikutnya adalah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Keluaran sub kegiatan ini adalah terpeliharanya 5 unit bangunan di area perkantoran, yaitu unit garasi, gedung utama, pos keamanan dan pemagaran. Kelima unit

ini berhasil diperbaiki dan direhab. Adanya perbaikan dan rehabilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan lingkungan tempat kerja sehingga para pegawai menjadi termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian capaian pada indikator ini berhasil 100%. Terakhir adalah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Keluaran utama sub kegiatan ini adalah terpeliharanya komputer dan printer sebanyak 50 unit. Selama tahun 2021, 50 unit komputer dan printer berhasil diperbaiki atau tercapai 100%. Dengan tercapainya semua target dari seluruh kegiatan yang ada pada indikator ini, diharapkan seluruh aparaturnya bisa bekerja dengan produktif dan maksimal guna meraih sasaran kinerja pegawai (SKP) yang baik sesuai target.

Capaian indikator nilai evaluasi SAKIP dengan target nilai 78.01 berhasil tercapai 78.03 atau terealisasi 100%. Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan SKPD tercapai sebesar 100%. Indikator ini ditandai dengan tersusunnya dokumen perencanaan (Renja) yang sangat menunjang dalam proses penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran. Sub kegiatan lainnya adalah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen laporan dan evaluasi dengan target 4 dokumen, yaitu laporan kinerja, LPPD, LKPj dan Laporan Bulanan yang disusun setiap bulan. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut sangat penting dalam rangka penyelenggaraan program dan sebagai acuan dalam pengambilan arah kebijakan. Dengan tersusunnya seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan, diharapkan SKPD mampu menjalankan sistem kinerja yang akuntabel yang pada akhirnya mampu meraih target nilai SAKIP. Dengan demikian indikator Nilai Evaluasi SAKIP tercapai 100%.

Capaian indikator laporan hasil internal dan eksternal dengan target WTP tercapai sesuai target. Keberhasilan indikator ini didukung oleh Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dengan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini menghasilkan output berupa laporan realisasi kinerja dan keuangan mulai dari level dokumen perencanaan, evaluasi hingga pelaporan seperti Rencana Kerja, Renstra, Laporan Keuangan Semester, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dll. Di samping itu, indikator ini didukung pula oleh Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya 6 dokumen realisasi anggaran. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut sangat signifikan dalam meningkatkan sistem akuntabilitas dan kinerja di SKPD mengingat dokumen tersebut tersampaikan pada dinas lain yang berwenang dalam mengontrol realisasi kinerja dan anggaran seperti Bappeda, BPKAD, Sekretariat Daerah dan Inspektorat. Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut diharapkan bisa memperlihatkan kualitas akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah itu sendiri sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan pada tingkat kabupaten.

Berdasarkan evaluasi data capaian masing-masing indikator diatas capaian sasaran meningkatkan kualitas pelayanan bisa rata-rata tercapai 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut mempunyai tugas untuk:

“Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut mempunyai fungsi organik dan tata kerja sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB dan kader KB serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian penduduk,

keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;
- g. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut tersebut di atas, dijabarkan dalam sasaran seperti yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut merumuskan kebijakan dan strategi, yang dijabarkan dalam penentuan program dan kegiatan tiap tahunnya dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPKBPPA
Kabupaten Garut

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	23
1	Nilai Evaluasi SAKIP			78,01	78,02	78,05	78,08	78,03		78,05	78,08	Sesuai Target
2	Total Fertility Rate (TFR)			2,40	2,30	2,20	2,10	2,40		2,20	2,10	Sesuai Target
3	Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera berbanding jumlah keluarga			5,6	5,4	5,2	5,0	5,6		5,2	5,0	Sesuai Target
4	Persentase Jumlah Kecamatan Yang Mempunyai Data dan Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan PPPA			100	100	100	100	100		100	100	Sesuai Target
5	Nilai Anugerah Parahita Ekapraya (APE)			Utama	Utama	Utama	Mentor	Utama		Utama	Mentor	Sesuai Target
6	Nilai Tahapan Kabupaten Layak Anak (KLA)			Madya	Nindiya	Utama	KLA	Madya		Utama	KLA	Sesuai Target

Sumber: LAKIP 2021

Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja sasaran, berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
6. Program Perlindungan Khusus Anak;
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Program Pengendalian Penduduk;
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
10. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Pembangunan keluarga merupakan suatu upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat melalui pengembangan keluarga. Pembangunan keluarga merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk BKKBN seperti diamanatkan dalam undang-undang nomor 52 tahun 2010 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kebijakan pembangunan keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Untuk menunjang hal itu, BKKBN memberikan berbagai model kegiatan melalui pembentukan kelompok-kelompok kegiatan (Poktan Tribina), seperti kelompok Bina Keluarga Balita, Kelompok Bina Keluarga Remaja, Kelompok Bina Keluarga Lansia.

Gambaran Umum Kelompok Tribina di Kabupaten Garut saat ini berdasarkan data laporan pengendalian lapangan (Dallap) Bidang Dalduk

menggambarkan suatu kenaikan yang signifikan dalam kaitannya dengan pembentukan kelompok. Hal ini seiring dengan pertumbuhan kampung KB yang ada di Kabupaten Garut.

Dari aspek kuantitas, pada tahun 2021 jumlah poktan tribina sesuai data yang dilaporkan di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

1. Poktan Bina Keluarga Balita 483 kelompok
2. Poktan Bina Keluarga Remaja 311 kelompok
3. Poktan Bina Keluarga Lansia 330 kelompok

Gambaran keberadaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga di Kabupaten Garut menunjukkan :

1. Beberapa Poktan BKB sudah terintegrasi dengan PAUD dan Posyandu (BKB Holistik Integratif). Sedangkan BKL terintegrasi dengan Posyandu Lansia.
2. Cakupan wilayah Poktan Tribina pada umumnya bervariasi ada yang kelurahan/desa, lingkungan RW/Dusun bahkan ada yang hanya beberapa RT.

Dari aspek Kualitas, keberadaan kelompok kegiatan Tribina tidak terlepas dari pemenuhan kriteria aspek input yang mencakup ketersediaan tenaga/SDM, ketersediaan sarana prasarana dan dana.

1. Untuk ketersediaan tenaga/SDM, pada umumnya semua poktan sudah terpenuhi, namun untuk kader yang terlatih masih banyak yang belum memenuhi kriteria di beberapa wilayah. Jumlah kader terlatih sudah memenuhi kriteria dan dapat dikatakan terpenuhi, selain itu sebagian besar kader di semua Poktan Tribina merangkap sebagai pengurus dan kader di kegiatan lain sehingga kader yang seharusnya memberikan

penyuluhan/materi di poktan tidak dilakukan karena dibebani tugas lain seperti administrasi pencatatan dan pelaporan yang seharusnya dikerjakan oleh pengurus.

2. Ketersediaan sarana dan Prasarana belum semua poktan Tribina memiliki sarana kegiatan (media penyuluhan, media interaksi, dan buku catatan/buku bantu kegiatan) dan tempat kegiatan yang tetap.
3. Terkait dukungan Dana umumnya semua poktan Tribina memiliki dukungan dana hanya berbeda sumber dananya. Misalnya bersumber dari APBN dan APBD, APBDes serta berasal dari swadaya masyarakat.

Permasalahan yang ditemui terkait Poktan Tribina yang belum optimal pada umumnya disebabkan dukungan dana yang terbatas, pelatihan yang kurang intensif dan pelaporan yang tidak dilakukan rutin dan lengkap serta pembinaan dan pemantauan yang jarang dan tidak rutin dilakukan oleh Petugas Lapangan KB. Permasalahan lainnya adalah rendahnya kesadaran orangtua sebagai anggota kelompok untuk aktif dalam kegiatan kelompok.

Rasio jumlah penyuluh KB berbanding jumlah Desa/Kelurahan secara umum sebenarnya sudah ideal, akan tetapi penyebaran tenaga penyuluhnya belum merata dikarenakan domisili penyuluh dengan desa garapan terkendala oleh jarak tempuh yang jauh.

Untuk kualitas Data dan Informasi dari segi cakupan Statistik rutin bulanan secara kuantitas sudah mencapai 100% sedangkan secara kualitas sudah mencapai 70%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberdayakan sumber daya manusia Sesuai Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012, Struktur Organisasi Perangkat Kerja Daerah pada Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut meliputi:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
- c. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
Sub Koordinator.
- d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan:
Sub Koordinator.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahkan:
Sub Koordinator.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
Sub Koordinator.
- g. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan:
Sub Koordinator.
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber daya manusia tersebut telah mencukupi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat disamping itu, pelayanan kinerja SKPD semakin meningkat dengan tersedianya tenaga teknis yang melayani keperluan masyarakat secara riil di lapangan sebagai ujung tombak pelayanan Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebanyak 355 orang. Dengan demikian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cukup melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan memenuhi standar operasional prosedur (SOP) sehingga kinerja pelayanan dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana keinginan masyarakat.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Pemahaman dan kesadaran tentang hak kesehatan reproduksi masih rendah karena masih adanya keterbatasan komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi masyarakat serta keluarga;

1. Masih tingginya angka pasangan usia subur dibawah usia 20 tahun yaitu 11,53% dan rata-rata usia kawin pertama wanita 19 tahun yang turut menyebabkan tingginya resiko bagi seorang ibu melahirkan dan anak yang dilahirkan (tingginya AKI AKB);
2. Kemandirian masyarakat dalam ber-KB masih rendah (42,24%) yang diakibatkan oleh faktor ekonomi dan sosial budaya serta semakin

- besarnya fasilitas pemerintah dalam penyelenggaraan fasilitas/ jaminan kesehatan dasar;
3. PUS yang menggunakan alat kontrasepsi non metode jangka panjang sangat tinggi yaitu, 68,95 %
 4. Tingginya jumlah *Unmetneed* (PUS yang ingin menunda kelahiran anak atau tidak menginginkan anak lagi tetapi tidak ber-KB) yaitu 13,29% yang disebabkan oleh pemahaman masyarakat akan cara ber-KB yang relatif masih rendah;
 5. Rendahnya akses pelayanan KB bagi keluarga miskin di wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galciltas) karena masih rendahnya jangkauan pelayanan dan operasional program KB;
 6. Partisipasi pria dalam ber KB masih rendah 0,54 %
 7. Belum optimalnya peran keluarga dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga terutama pembinaan tumbuh kembang anak;
 8. Menurunnya kualitas mekanisme operasional program KKB karena rendahnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan program pembangunan lainnya, dalam pengelolaan program yang disertai dengan semakin berkurangnya jumlah petugas lini lapangan karena usia pensiun yang tidak didukung dengan rekrutmen;
 9. Masih rendahnya pemanfaatan dan pemutakhiran data basis/ data mikro keluarga baik secara internal maupun eksternal, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas komunikasi data, diseminasi dan dinamisasi hasil pendataan keluarga;
 10. Belum optimalnya peran institusi masyarakat pedesaan dalam penggarapan program KKB yang disebabkan oleh rendahnya pembinaan serta dukungan operasional;

11. Masih tingginya angka kelahiran (*Total Fertility Rate/ TFR* = 2, 77 hasil Susenas Penduduk tahun 2019) dan Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,21;
12. Belum optimalnya peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak karena masih rendahnya dukungan kebijakan dalam pencegahan, penanganan, pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi kasus kekerasan perempuan dan anak;
13. Masih rendahnya pemenuhan hak-hak anak, yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang rendah (putus sekolah, gizi buruk, pekerja anak, hak sipil anak);
14. Masih rendahnya peran perempuan dalam akselerasi pembangunan daerah akibat belum optimalnya pengarusutamaan gender yang disebabkan oleh kontruksi sosial budaya yang belum berwawasan gender.

2.3.3 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tantangan Pengembangan Pelayanan

Permasalahan dibawah ini meliputi tantangan dan kelemahan yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut dalam pelaksanaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Tantangan yang dihadapi periode ke depan adalah sebagai berikut:

a. Tingkat kesertaan ber-KB yang semakin tinggi.

Intervensi Program KB selama 42 tahun telah berhasil mengendalikan kelahiran secara signifikan, yang ditandai dengan menurunnya *Total Fertility Rate (TFR)*.

Berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2020 pengguna alat kontrasepsi sudah mencapai 336.606 akseptor atau 67,57 % dari total 498.124 pasangan usia subur yang ada. Sehingga angka kelahiran mengalami penurunan yang cukup berarti dari TFR 6,19 pada awal tahun 1970 menjadi 2,79 pada tahun 2000, artinya dari rata-rata 6-7 anak yang dilahirkan wanita pada waktu suburnya di tahun 1970 turun menjadi 2-3 anak pada tahun 2000, sedangkan tahun 2010 berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 TFR Kabupaten Garut mengalami penurunan menjadi 2,56. Perkembangan TFR pada tahun 1970 s.d 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.4
Perkembangan TFR berdasarkan hasil Sensus Penduduk

NO	TAHUN SENSUS	TFR KAB. GARUT	TFR PROP JABAR	TFR NASIONAL
1	1970	6,19	5,90	5,60
2	1980	5,50	5,07	4,69
3	1990	3,55	3,37	2,92
4	2000	2,79	2,51	2,34
5	2010	2,56	2,48	2,30

Sumber: BPS, Sensus Penduduk

Keadaan ini menunjukkan indikasi bahwa Keluarga Berencana sudah menjadi kebutuhan dan merupakan gerakan masyarakat, sehingga menuntut tenaga pelaksana dan pengelola yang memiliki profesionalisme dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Masyarakat sudah mengenal pelayanan yang berkualitas dan memberikan

kenyamanan. Oleh karena itu, kinerja PLKB harus berorientasi kepada kepuasan pelanggan dalam hal ini akseptor (peserta KB).

Semakin terbukanya arus informasi KB, menuntut pengelolaan gerakan yang semakin kompleks baik dalam penyediaan dana dan sarana maupun kesiapan teknis dari para petugas lapangan dalam mengantisipasi berbagai tuntutan pemenuhan permintaan masyarakat dalam arti yang sebenarnya (bukan target).

b. Tingginya angka kesuburan pada remaja (WUS 15-19 tahun).

Berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2020, terdapat Wanita Usia Subur (WUS) 15-19 tahun berjumlah 135.116 atau 18,97 % dari total WUS yang ada sebanyak 712.065 Jumlah absolut wanita usia subur (15-49 tahun) di Kabupaten Garut akan meningkat lebih banyak di tahun-tahun mendatang karena dampak “population momentum”, atau momentum penduduk. Tingginya angka kesuburan pada remaja menyebabkan adanya kecenderungan semakin meningkatnya PUS baru. Peningkatan jumlah pasangan usia subur ini memiliki implikasi bahwa program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Kabupaten Garut perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini karena bukan hanya lebih sulitnya memelihara peserta KB lama, tetapi “*peledakan jumlah wanita usia subur*” yang sangat signifikan. Perundang-undangan di Indonesia harus dapat menjamin bahwa kebutuhan mereka tentang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi harus terpenuhi, karena masalah ini adalah terkait dengan hak-hak reproduksi mereka.

c. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja tentang Pola Reproduksi Sehat.

Sebagai pengaruh dari informasi KB yang semakin terbuka yang membias kepada persepsi para “kawula muda” mengenai perilaku seksual

menyimpang dan mempunyai indikasi penggunaan kontrasepsi, maka para petugas dan institusi dituntut untuk memiliki kemampuan teknis pemberian informasi KB yang benar dan jujur melalui pendekatan konseling atau Komunikasi Interpersonal.

d. Perubahan paradigma pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

Untuk mengantisipasi kondisi kinerja kader pengelola institusi yang semakin “canggih” dimasa mendatang, maka institusi tidak lagi diperlakukan sebagai objek tetapi sebagai “*mitra kerja*”. Pendekatan operasionalnya, PLKB menempatkan diri untuk memfasilitasi bukan mengurui. Demikian juga, forum pembinaan tidak lagi diformat secara konvensional yang selama ini dilakukan, tetapi lebih diarahkan pada pemanfaatan forum komunikasi sosial yang telah ada dimana mereka berperan aktif.

e. Peningkatan Ekonomi Keluarga semakin diperlukan.

Kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang selama ini dilaksanakan, dapat dijadikan “*entry point*” dari upaya pengendalian kelahiran dan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, para petugas lapangan dituntut untuk “*selalu belajar meningkatkan wawasan kewirausahaan*”.

f. Peningkatan Ketahanan Keluarga semakin diperlukan.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya pengembangan SDM potensial, maka kegiatan keluarga dalam membina tumbuh kembang balita, anak dan remaja, serta kepedulian keluarga dalam pengembangan potensi dan produktifitas lansia akan menjadi kegiatan hari-hari keluarga. Oleh karena itu, para petugas lapangan dituntut untuk selalu “*belajar meningkatkan wawasan mengenai psikologi terapan*”. Mengingat

PLKB akan “dipandang mampu oleh masyarakat sebagai konsultan teknis.

g. Arus informasi gender dan perlindungan anak yang semakin terbuka.

Sejak terbitnya kebijakan pengarusutamaan gender pada tahun 2000 dalam bentuk Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, kemudian diikuti oleh perundang-undangan dalam rangka meneguhkan komitmen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka arus informasi gender dan perlindungan anak semakin luas dan terbuka. Kondisi demikian menyebabkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilaporkan dari tahun ke tahun terus meningkat. Sehingga hal ini menuntut penyediaan layanan secara terpadu harus semakin dioptimalkan. Oleh karena, partisipasi masyarakat khususnya lembaga penyedia layanan untuk korban tindak kekerasan sangat penting peranannya. Demikian pula peran dan kerjasama dengan sektor pemerintah yang terkait dalam memberikan layanan korban harus terbangun dengan baik. Tanpa ada kerjasama yang baik dan prosedur operasional layanan kepada korban secara terpadu, maka pelayanan terhadap korban tidak akan berjalan secara optimal.

Peluang Pengembangan Pelayanan

Adapun peluang yang ada di DPPKBPPPA yang dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk menghadapi tantangan tersebut, meliputi:

a. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi.

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 2) Dukungan pemerintah daerah dalam bidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Dukungan dan persetujuan Bupati terhadap rencana program dan Kegiatan;
- 4) Adanya Peraturan Daerah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut.

b. Tersedianya potensi tenaga Program.

Potensi tenaga program yang dimiliki DPPKBPPPA Kabupaten Garut sampai tahun 2021 adalah:

- 1) Balai Penyuluhan KB yang merupakan sarana petugas pengelola program KKB tingkat kecamatan tersedia sebanyak 8 orang di 42 kecamatan yang ada.
- 2) Tenaga Penyuluh KB yang berada dilini lapangan berjumlah 355 orang terdiri dari: UPT sebanyak 8 orang, Kasubag TU UPT sebanyak 7 orang, PLKB/PKB 85 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 9 Orang, Tenaga Penggerak Desa (TPD) 116 orang, Teladan Keluarga Berencana 80 orang, Motekar 42 dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) 8 orang.
- 3) Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), sebagai pembantu pengelola tingkat desa sebanyak 442 Pos KB Desa, tingkat RW 4710 Sub PPKBD dan tingkat RT 15.668 kelompok KB.

c. Potensi Sarana Operasional.

Sampai dengan Bulan Desember 2020, DPPKBPPPA Kabupaten Garut telah memiliki sarana operasional yang cukup memadai mulai tingkat Kabupaten sampai ke tingkat desa, antara lain meliputi sarana

perkantoran, balai penyuluh KB, kendaraan roda empat operasional, Mobil Unit Penerangan (MUPEN), Mobil Unit Pelayanan (MUPEL), kendaraan roda dua bagi seluruh Petugas Lapangan KB tingkat kecamatan dan desa.

d. Potensi Pelayanan Reproduksi (Pelayanan Kontrasepsi).

Dalam rangka memberikan pelayanan reproduksi, dari 198 Klinik KB yang ada di seluruh Kabupaten Garut 90% sudah dilengkapi dengan sarana medis dan tenaga terlatih yang cukup memadai. Tenaga medis khususnya bidan sudah tersedia di setiap desa, sehingga akan lebih mempermudah terhadap jangkauan pelayanan KB.

Penyediaan kontrasepsi dilakukan melalui dua jalur yaitu melalui pengadaan oleh pemerintah dan swasta. Khusus dalam pengadaan alat kontrasepsi jalur swasta merupakan potensi yang dapat dikembangkan bagi pemerintah daerah maupun dunia swasta.

e. Potensi Manajemen Program KB Nasional.

Keberhasilan Program KB di Kabupaten Garut selama ini didukung dengan adanya Mekanisme Operasional yang baku mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW dan RT dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat yang ada melalui kegiatan antara lain: Pendataan Keluarga yang dilaksanakan setiap tahun, Pertemuan Institusi, Rapat Koordinasi, Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Pelayanan, Pencatatan dan Pelaporan.

f. Kemitraan dengan Organisasi Sosial dan Lembaga Kemasyarakatan.

Terjalannya kemitraan yang cukup baik dengan organisasi sosial seperti dengan PKK, Aisyiah dan Fatayat NU. Berbagai potensi peluang di atas, merupakan salah satu modal kekuatan bagi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut untuk menjadi lembaga

pemerintah yang memegang amanah dalam pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dapat menyerasikan dan mensinergikan kebijakannya dengan kebijakan pembangunan lainnya

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah salah satu tahapan dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Garut tahun 2019-2024 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas-bawah serta bawah-atas (*topdown-bottom up*). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya.

Tabel. 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Garut

SKPD: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				7.800.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				7.800.000	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Garut	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas yang Responsif Gender	75 %	2.500.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Garut	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas yang Responsif Gender	75 %	2.500.000	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Peserta Sosialisasi	33 Orang	150.000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Peserta Sosialisasi	33 Orang	150.000	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Perangkat Daerah	150.000	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Perangkat Daerah	150.000	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Anggota PEKKA yang terbina	100 Orang	2.100.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Anggota PEKKA yang terbina	100 Orang	2.100.000	

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Garut	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	67 Organisasi	2.100.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Garut	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	67 Organisasi	2.100.000		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah organisasi perempuan yang di bina	67 Organisasi Perempuan	250.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah organisasi perempuan yang di bina	67 Organisasi Perempuan	250.000		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 Lembaga	250.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 Lembaga	250.000		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Garut	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/Swasta/ Ormas yang Responsif Gender	75 %	450.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Garut	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/Swasta/ Ormas yang Responsif Gender	75 %	450.000		
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah pasangan yang mendapat buku nikah	50 Pasangan	400.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah pasangan yang mendapat buku nikah	50 Pasangan	400.000		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Perangkat Daerah	400.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Perangkat Daerah	400.000		
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Rangka perlindungan perempuan korban kekerasan perlu dilaksanakannya Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan peningkatan jumlah Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	30 Kasus	50.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Rangka perlindungan perempuan korban kekerasan perlu dilaksanakannya Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan peningkatan jumlah Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	30 Kasus	50.000		

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	50.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	50.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Garut	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas yang Responsif Gender	75 %	300.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Garut	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas yang Responsif Gender	75 %	300.000	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah persentase peningkatan Keluarga sehat Sejahtera di desa Binaan P2WKSS	100 KK	200.000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah persentase peningkatan Keluarga sehat Sejahtera di desa Binaan P2WKSS	100 KK	200.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Perangkat Daerah	150.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Perangkat Daerah	150.000	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Layanan Pembelajaran Keluarga	14 Layanan	100.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Layanan Pembelajaran Keluarga	14 Layanan	100.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Kab. Garut	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	79 Lembaga	100.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Kab. Garut	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	79 Lembaga	100.000	

	Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab. Garut	Persentase Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas ramah Anak	70 %	150.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab. Garut	Persentase Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas ramah Anak	70 %	150.000	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	150.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	150.000	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Garut	Persentase Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas ramah Anak	70 %	3.300.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Garut	Persentase Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas ramah Anak	70 %	3.300.000	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah partisipasi Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha dalam kegiatan Kabupaten Layak Anak	42 Kecamatan	1.050.000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah partisipasi Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha dalam kegiatan Kabupaten Layak Anak	42 Kecamatan	1.050.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	1.050.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	1.050.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/Pembentukan/ dalam Mendukung Kegiat Layak Anak	5 Kecamatan	2.250.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/Pembentukan/ dalam Mendukung Kegiat Layak Anak	5 Kecamatan	2.250.000	
	Penyediaan Layanan	Kab.	Jumlah Anak yang	1375 Orang	750.000	Penyediaan Layanan	Kab.	Jumlah Anak yang	1375 Orang	750.000	

	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Garut	Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Garut	Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400.000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	700.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	700.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Garut	Persentase Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas ramah Anak	70 %	1.100.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Garut	Persentase Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas ramah Anak	70 %	1.100.000	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Pendampingan dan Penanganan Kasus Kekerasan Anak/Sosialisasi dalam Program Perlindungan Khusus Anak	42 Kecamatan	700.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Pendampingan dan Penanganan Kasus Kekerasan Anak/Sosialisasi dalam Program Perlindungan Khusus Anak	42 Kecamatan	700.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Perangkat Daerah	250.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Perangkat Daerah	250.000	
	Koordinasi dan	Kab.	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	450.000	Koordinasi dan	Kab.	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	450.000	

	Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Garut	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Garut	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	200.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	200.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Layanan	200.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Layanan	200.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				43.979.161	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				43.979.161	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Garut	Persentase Cakupan Pelayanan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	13.296.701	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Garut	Persentase Cakupan Pelayanan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	13.296.701	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	10 Dokumen	518.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	10 Dokumen	518.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	143.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	143.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	375.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	375.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	8.343.239	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	8.343.239	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/Bulan	8.310.239	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/Bulan	8.310.239	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	33.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	33.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Garut	Persentase Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	145.628	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Garut	Persentase Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	145.628	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	145.628	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	145.628	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut	Persentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	723.100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut	Persentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	723.100	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	23.100	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	23.100	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	700.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	700.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	Persentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	854.462	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	Persentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	854.462	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	110.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	110.000	
	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Kab. Garut	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	10 Paket	55.000	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Kab. Garut	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	10 Paket	55.000	

	Penggandaan		yang Disediakan			Penggandaan		yang Disediakan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen	11.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen	11.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	110.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	110.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	568.462	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	568.462	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	Persentase Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	2.177.347	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	Persentase Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	2.177.347	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	1.825.500	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	1.825.500	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	351.847	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	351.847	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	187.671	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	187.671	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	77.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	77.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	110.671	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	110.671	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	346.752	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	346.752	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kab. Garut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	328 Unit	121.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kab. Garut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	328 Unit	121.000	

	Dinas Jabatan					Dinas Jabatan					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut	Jumlah Supir Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Orang 15 Unit	82.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut	Jumlah Supir Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Orang 15 Unit	82.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut	Jumlah Gedung	3 Unit	126.752	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut	Jumlah Gedung	3 Unit	126.752	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	16.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	16.500.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Garut	Meningkatnya Akurasi Data dan Informasi KKBPK dan PPPA tingkat kecamatan	75 %	4.680.459	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Garut	Meningkatnya Akurasi Data dan Informasi KKBPK dan PPPA tingkat kecamatan	75 %	4.680.459	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 Dokumen	1.617.499	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 Dokumen	1.617.499	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000	
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Garut	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	4 Satuan Pendidikan	100.000	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Garut	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	4 Satuan Pendidikan	100.000	
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data	Kab. Garut	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data	1 Laporan	362.499	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data	Kab. Garut	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data	1 Laporan	362.499	

	Keluarga		Keluarga			Keluarga		Keluarga			
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Garut	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	805.000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Garut	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	805.000	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.062.960	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.062.960	
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	867.960	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	867.960	
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	300.000	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	300.000	
	Pemetaan Kependudukan	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	1 Dokumen	250.000	Pemetaan Kependudukan	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	1 Dokumen	250.000	
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kab. Garut	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	10 Unit	450.000	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kab. Garut	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	10 Unit	450.000	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	895.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	895.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kab. Garut	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	300.000	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kab. Garut	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	300.000	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Garut	Meningkatnya Persentase Kesertaan ber KB (CU/PUS)	73 %	22.862.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Garut	Meningkatnya Persentase Kesertaan ber KB (CU/PUS)	73 %	22.862.000	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi	Kab. Garut	Persentase Cakupan Pelaksanaan Advokasi,	100 %	1.430.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi	Kab. Garut	Persentase Cakupan Pelaksanaan Advokasi,	100 %	1.430.000	

	dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	680.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	680.000	
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Kab. Garut	Jumlah kontribusi Media Cetak, Elektronik dan Lainnya terhadap Program KKBPK	100 %	750.000	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Kab. Garut	Jumlah kontribusi Media Cetak, Elektronik dan Lainnya terhadap Program KKBPK	100 %	750.000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Garut	Persentase Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 %	9.060.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Garut	Persentase Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 %	9.060.000	
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Garut	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	10 Organisasi	3.500.000	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Garut	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	10 Organisasi	3.500.000	
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Garut	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	8 Unit	660.000	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Garut	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	8 Unit	660.000	
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Garut	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga	1 Laporan	2.000.000	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Garut	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga	1 Laporan	2.000.000	

			Berencana (PKB/PLKB)					Berencana (PKB/PLKB)			
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Garut	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100 Orang	2.900.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Garut	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100 Orang	2.900.000	
	Pengendalian dan Pendistribusian dan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Persentase Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5.500.000	Pengendalian dan Pendistribusian dan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Persentase Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5.500.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Garut	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	180 Orang	4.000.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Garut	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	180 Orang	4.000.000	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	350.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	350.000	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Garut	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	8 Unit	400.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Garut	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	8 Unit	400.000	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Garut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	300.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Garut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	300.000	
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kab. Garut	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	100 Orang	250.000	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kab. Garut	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	100 Orang	250.000	
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Garut	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	70 Orang	200.000	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Garut	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	70 Orang	200.000	

	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Garut	Persentase Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 %	6.872.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Garut	Persentase Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 %	6.872.000	
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Garut	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Organisasi	140.000	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Garut	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Organisasi	140.000	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Garut	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	42 Kampung	5.232.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Garut	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	42 Kampung	5.232.000	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Garut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	1.500.000	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Garut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	1.500.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab. Garut	Meningkatnya Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga	42 %	3.140.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab. Garut	Meningkatnya Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga	42 %	3.140.000	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Garut	Persentase Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	2.790.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Garut	Persentase Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	2.790.000	
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling	Kab. Garut	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling	25 Kelompok	440.000	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling	Kab. Garut	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling	25 Kelompok	440.000	

	Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk			Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk			
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Garut	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32 Unit	325.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Garut	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32 Unit	325.000	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Garut	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15 Orang	300.000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Garut	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15 Orang	300.000	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Garut	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3990 Orang	650.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Garut	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3990 Orang	650.000	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Garut	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	75.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Garut	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	75.000	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua	Kab. Garut	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	350.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua	Kab. Garut	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	350.000	

	Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		(Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		(Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			
	Advokasi dan Promosi IPK	Kab. Garut	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1050 Orang	650.000	Advokasi dan Promosi IPK	Kab. Garut	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1050 Orang	650.000	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Garut	Persentase Cakupan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	350.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Garut	Persentase Cakupan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	350.000	
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Garut	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, -R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	200.000	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Garut	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, -R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	200.000	
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Garut	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	150.000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Garut	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	150.000	
TOTAL					51.779.161					51.779.161	

Sumber:

RKPD(SIPD)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Bidang Keluarga Berencana

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, optimalisasi pelayanan program keluarga berencana harus terus dimaksimalkan dengan sasaran utama para keluarga pra sejahtera. Untuk membantu pendewasaan usia perkawinan masyarakat menghendaki suatu wadah yang menangani remaja dalam bentuk kelompok pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja (PIK-KRR) di desa, karang taruna, sekolah, pesantren, perguruan tinggi diharapkan adanya pelatihan-pelatihan masuk dalam pelayanan propinsi, program pembinaan ketahanan keluarga masyarakat menghendaki adanya wadah yang mengayomi ketahanan keluarga dalam bentuk kelompok bina-bina (BKB, BKL, BKR) pembinaan diharapkan masuk dalam pelayanan propinsi.

2.5.2 Bidang Keluarga Sejahtera

Dalam hal peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga masyarakat mengharapkan penyertaan modal usaha pada kelompok yang ada di desa yaitu kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) masuk dalam penyertaan modal dari propinsi/ pusat.

2.5.3 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada program ini mengusulkan adanya pembinaan organisasi perempuan untuk meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan melalui sosialisasi kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk program P2W-KSS, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Arah Kebijakan Nasional

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana pada hakekatnya merupakan suatu upaya antisipasi terhadap kondisi, tantangan dan peluang baik yang berorientasi pada kondisi individual, keluarga, masyarakat maupun negara. Berangkat dari kepedulian terhadap kondisi tersebut, maka konsep Kependudukan dan Keluarga Berencana akan senantiasa diwarnai dengan nuansa problematika dan dinamika kependudukan yang dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Merujuk pada Undang-undang tersebut Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Dengan demikian, keluarga yang akan dibangun melalui Program Keluarga Berencana Nasional adalah Keluarga Berkualitas. Konsep keluarga berkualitas harus dapat dibangun secara utuh dan tidak terpisahkan satu sama lain sebagaimana diisyaratkan pada pasal 1 ayat 10 UU Nomor 52 tahun 2009, yaitu bahwa Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berlandaskan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pola kebijakan Keluarga Berencana yang paling mendasar adalah pengendalian jumlah penduduk. Peranan perempuan dalam ber-KB selama

ini telah menjadikan mereka “Pahlawan Kependudukan” karena partisipasinya tersebut telah mampu menggeser struktur penduduk pada proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar. Hasil Laporan F1 bulan desember tahun 2021 menunjukkan, angka kesertaan perempuan dalam ber-KB sebesar 98,54 persen dari total peserta KB sebanyak 374.798, sedangkan peserta KB pria hanya 0,54 persen.

Selanjutnya keberhasilan dari segi kuantitas yang tergambarkan dalam penurunan angka kelahiran perlu terus dilanjutkan dan diimbangi dengan percepatan peningkatan kualitas keluarga. Percepatan peningkatan kualitas keluarga semakin dirasakan urgensinya seiring dengan persaingan global dan perubahan komposisi dan struktur penduduk yang berlangsung makin cepat sebagai akibat dari keberhasilan dalam aspek kuantitas. Dengan demikian, arah dan pendekatan pembangunan keluarga perlu dikembangkan dari pendekatan yang selain pendekatan kuantitatif juga ke arah pendekatan yang lebih kualitatif, agar keluarga menjadi sumber daya manusia potensial yang produktif dan kompetitif.

Terkait dengan penyiapan generasi penerus yang mempunyai kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, maka penting untuk mengetahui kondisi kualitas anak untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan. Perencanaan keluarga berencana selayaknya tidak hanya semata ditujukan untuk mengatasi jumlah anak dan mengendalikan kelahiran, tetapi lebih penting lagi yaitu merencanakan pembinaan keluarga, sehingga terwujud keluarga termasuk anak-anak yang berkualitas. Upaya ini perlu melibatkan berbagai bidang pembangunan yang dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif, sehingga menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif.

Selain dari pada itu penting pula diperhatikan, bahwa pembangunan kualitas penduduk harus lebih memperhitungkan aspek hak-hak azasi manusia serta menampung keperluan dan aspirasi perempuan dan laki-laki. Gender dapat dikatakan sebagai inti dari kebijakan dan pengembangan program-program kependudukan dimana peran perempuan dan laki-laki harus diupayakan secara berimbang. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bahwa pada hakekatnya pembangunan ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Namun pada kenyataannya, antara laki-laki dan perempuan masih terjadi ketimpangan, baik dalam berperan serta dalam pembangunan maupun dalam menikmati hasil pembangunan, dengan kata lain belum terjadi kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan perkembangan permasalahan dan hasil yang dicapai dalam tahun 2021, tujuan dan sasaran yang dicapai dalam Dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019-2024 serta berbagai permasalahan dan isu strategis yang harus dipecahkan dan dihadapi tahun 2023, maka sebagai upaya untuk mewujudkan hasil pembangunan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkesinambungan, tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten dalam Renja Tahun 2023, meliputi :

Tujuan dan Sasaran pembangunan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut misi, yaitu

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PPKBPPA Kabupaten Garut Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP	78,05
2.	Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Perumbuhan Penduduk (LPP)	Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	2,20
3.	Meningkatkan Tahapan Keluarga Sejahtera dan Percepatan Penurunan Stunting	Jumlah Keluarga Sejahtera	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Jumlah Keluarga Pra Sejahtera berbanding jumlah keluarga	5,2
		Penurunan Prevalensi Stunting	Penurunan Persentase Balita Stunting	Persentase Balita Stunting	17
4.	Meningkatkan Sistem Pengendalian Penduduk	Tersedianya Sistem Pengendalian Penduduk	Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan KB dan PPPA	Persentase Jumlah Kecamatan Yang Mempunyai Data dan Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan PPPA	100
5.	Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender	Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatkan kualitas hidup serta fungsi dan peran perempuan dalam pembangunan	Nilai Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Utama
6.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Indikator KLA	Meningkatnya Nilai Indikator KLA	Nilai Tahapan Kabupaten Layak Anak (KLA)	Utama

Sumber: Renstra Perubahan 2019-2024

3.3 Program dan Kegiatan Dinas PPKBPPA Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan merupakan strategi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang, pada umumnya rencana kinerja Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, karena target kinerja ditetapkan berdasarkan rencana strategi SKPD.

Sebagaimana dituangkan dalam rencana kerja Dinas PPKBPPA Tahun 2023, bahwa Tahun 2023 ditetapkan melaksanakan 10 kebijakan program, 29 Kegiatan dan 72 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut meliputi:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Garut

SKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			7.800.000.000				5.380.000.000			
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas yang Responsif Gender	Kab. Garut	75 %	2.500.000.000		75 %	395.000.000		
2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kab. Garut	33 Orang	150.000.000		33 Orang	175.000.000	
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	33 Perangkat Daerah	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33 Perangkat Daerah	175.000.000
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Anggota PEKKA yang	Kab.	100 Orang	2.100.000.000		100 Orang	110.000.000

					Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	terbina	Garut						
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	67 Organisasi	2.100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		67 Organisasi	110.000.000
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang di bina	Kab. Garut	67 Organisasi Perempuan	250.000.000			67 Organisasi Perempuan	110.000.000
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab. Garut	2 Lembaga	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Lembaga	110.000.000
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas yang Responsif Gender	Kab. Garut	75 %	450.000.000			75 %	505.000.000
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasangan yang mendapat buku nikah	Kab. Garut	50 Pasangan	400.000.000			50 Pasangan	450.000.000
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	33 Perangkat Daerah	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 Perangkat Daerah	450.000.000
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rangka perlindungan perempuan korban kekerasan perlu dilaksanakannya Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan peningkatan jumlah Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kab. Garut	30 Kasus	50.000.000			30 Kasus	55.000.000
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan	Kab. Garut	1 Layanan	50.000.000	Dana Transfer		1 Layanan	55.000.000

					Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				Umum-Dana Alokasi Umum			
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Jumlah Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas yang Responsif Gender	Kab. Garut	75 %	300.000.000			75 %	330.000.000
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah persentase peningkatan Keluarga sehat Sejahtera di desa Binaan P2WKSS	Kab. Garut	100 KK	200.000.000			100 KK	220.000.000
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	33 Perangkat Daerah	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 Perangkat Daerah	160.000.000
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	60.000.000
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pembelajaran Keluarga	Kab. Garut	14 Layanan	100.000.000			14 Layanan	110.000.000
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab. Garut	79 Lembaga	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		79 Lembaga	110.000.000
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas ramah Anak	Kab. Garut	70 %	150.000.000			70 %	175.000.000
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam	Jumlah Dokumen	Kab. Garut	1 Dokumen	150.000.000			1 Dokumen	175.000.000

					Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Alokasi Umum			
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	1 Dokumen	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	450.000.000
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Lembaga Pemerintah/ Swasta/ Ormas ramah Anak	Kab. Garut	70 %	1.100.000.000			70 %	1.025.000.000
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan dan Penanganan Kasus Kekerasan Anak/Sosialisasi dalam Program Perlindungan Khusus Anak	Kab. Garut	42 Kecamatan	700.000.000			42 Kecamatan	525.000.000
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	25 Perangkat Daerah	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Perangkat Daerah	275.000.000
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	1 Dokumen	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	250.000.000
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	40 Orang	200.000.000			40 Orang	250.000.000
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	40 Layanan	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Layanan	250.000.000
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	Jumlah Dokumen	Kab. Garut	1 Dokumen	200.000.000			1 Dokumen	250.000.000

					yang memerlukan Perlindungan Tingkat Kabupaten/Kota Khusus Daerah								
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	Kab. Garut	1 Dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	250.000.000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				43.979.161.639				42.920.000.000
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	13.296.701.939			100 %	13.730.000.000
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Garut	10 Dokumen	518.500.000			10 Dokumen	210.000.000
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut	6 Dokumen	143.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	150.000.000
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut	4 Laporan	375.500.000			4 Laporan	60.000.000
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Garut	12 Bulan	8.343.239.794			12 Bulan	9.035.000.000
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut	68 Orang/Bulan	8.310.239.794	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		68 Orang/Bulan	9.000.000.000
2	14	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Garut	6 Dokumen	33.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	35.000.000
2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	145.628.525			100 %	150.000.000
2	14	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik	Jumlah Dokumen Pengamanan	Kab.	1 Dokumen	145.628.525			1 Dokumen	150.000.000

					Daerah SKPD	Barang Milik Daerah SKPD	Garut							
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	723.100.000			100 %	675.000.000	
2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Garut	80 Paket	23.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Paket	25.000.000	
2	14	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Garut	150 Orang	700.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 Orang	650.000.000	
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut	100 %	854.462.500			100 %	615.000.000	
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut	10 Paket	110.000.000			10 Paket	120.000.000	
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Garut	10 Paket	55.000.000			10 Paket	60.000.000	
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Garut	100 Dokumen	11.000.000			100 Dokumen	15.000.000	
2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut	1 Laporan	110.000.000			1 Laporan	120.000.000	
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut	1 Laporan	568.462.500			1 Laporan	300.000.000	
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Garut	100 %	2.177.347.100			100 %	2.400.000.000	
2	14	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Garut	11 Unit	1.825.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	2.100.000.000	
2	14	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Garut	2 Unit	351.847.100			2 Unit	300.000.000	

2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	100 %	187.671.620			100 %	180.000.000
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Garut	1 Laporan	77.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	80.000.000
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Garut	1 Laporan	110.671.620			1 Laporan	100.000.000
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	100 %	346.752.400			100 %	465.000.000
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Garut	328 Unit	121.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		328 Unit	125.000.000
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Supir Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Garut	3 Orang 15 Unit	82.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Orang 15 Unit	
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	Kab. Garut	3 Unit	126.752.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	90.000.000
2	14	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Garut	20 Unit	16.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	230.000.000
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Akurasi Data dan Informasi KKBPK dan PPPA tingkat kecamatan	Kab. Garut	75 %	4.680.459.700			75 %	4.730.000.000
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam	Jumlah Dokumen Hasil Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam	Kab. Garut	1 Dokumen	1.617.499.700			1 Dokumen	1.745.000.000

					Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk							
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Garut	1 Dokumen	895.000.000	DAK Non Fisik- BOKB-KB		1 Dokumen	900.000.000
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Kab. Garut	1 Laporan	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	350.000.000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya Persentase Kesertaan ber KB (CU/PUS)	Kab. Garut	73 %	22.862.000.000			73 %	21.295.000.000
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Garut	100 %	1.430.000.000			100 %	2.350.000.000
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Garut	1 Dokumen	680.000.000	DAK Non Fisik- BOKB-KB		1 Dokumen	700.000.000
2	14	03	2.01	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah kontribusi Media Cetak, Elektronik dan Lainnya terhadap Program KKBPK	Kab. Garut	100 %	750.000.000	DAK Non Fisik- BOKB-KB		100 %	800.000.000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Garut	100 %	9.060.000.000			100 %	9.550.000.000
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan	Kab. Garut	10 Organisasi	3.500.000.000	DAK Non Fisik- BOKB-KB		10 Organisasi	3.750.000.000

						oleh PKB/PLKB							
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Kab. Garut	8 Unit	660.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		8 Unit	700.000.000
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Garut	1 Laporan	2.000.000.000	DAK Non Fisik- BOKB-KB		1 Laporan	2.100.000.000
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Garut	100 Orang	2.900.000.000	DAK Non Fisik- BOKB-KB		100 Orang	3.000.000.000
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	100 %	5.500.000.000			100 %	6.445.000.000
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Garut	180 Orang	4.000.000.000	DAK Non Fisik- BOKB-KB		180 Orang	4.400.000.000
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Garut	1 Dokumen	350.000.000	DAK Non Fisik- BOKB-KB		1 Dokumen	375.000.000
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Garut	8 Unit	400.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		8 Unit	450.000.000
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan	Kab. Garut	1 Laporan	300.000.000	DAK Non Fisik- BOKB-KB		1 Laporan	350.000.000

						Keluarga							
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kab. Garut	25 Kelompok	440.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Kelompok	500.000.000
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Garut	32 Unit	325.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		32 Unit	350.000.000
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Garut	15 Orang	300.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		15 Orang	325.000.000
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Garut	3990 Orang	650.000.000	DAK Non Fisik- BOKB-KB		3990 Orang	700.000.000
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Garut	1 Laporan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	80.000.000
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi	Kab. Garut	1 Laporan	350.000.000	DAK Non Fisik- BOKB-KB		1 Laporan	375.000.000

					Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)							
2	14	04	2.01	11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Garut	1050 Orang	650.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1050 Orang	440.000.000
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Cakupan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Garut	100 %	350.000.000			100 %	395.000.000
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, -R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Garut	1 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	220.000.000
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Garut	1 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

Sumber : Sistem Infomasi Pemerintah Daerah (RKPD-SIPD)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT KERJA

Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, Renja tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2023 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun anggaran 2023. Disamping itu penyusunan rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, Leasing, Konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum

perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan sistem *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut yang didalamnya mencakup penjabaran Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan menuju penyusunan Renja tahun 2023 dalam mencapai tujuan pembangunan pada urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN